



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya atau kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab.

Menurut (Manisa & Defung, 2017), ada dua model konsep *stakeholder*, yaitu :

a) Model kebijakan dan perencanaan bisnis

Model ini berfokus pada pengembangan, evaluasi, dan persetujuan keputusan strategis perusahaan. *Stakeholder* berfokus pada cara yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*.

b) Model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*

Perencanaan perusahaan dan analisis yang diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang berlawanan dengan perusahaan.

Stakeholder dikategorikan menjadi *primary stakeholders* yang merupakan anggota yang sangat memengaruhi keperluan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung segala akibat, yakni investor, kreditur, karyawan, pemasok, saluran pemasaran, dan pelanggan serta *secondary stakeholders* dimana anggota tidak berpengaruh secara penting terhadap ekonomi perusahaan, misalnya masyarakat umum, lembaga sosial masyarakat, media, dan serikat buruh (Maulana, 2010).



Berkembangnya teori *stakeholder* dan *triple bottom line*, membuat perusahaan semakin dituntut untuk berkontribusi dalam pembangunan yang memperhatikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Gambar 2.1

Konsep Triple Bottom Line (TBL)



Sumber : (Pengadaan Web, 2020)

Gambar 1.1 menunjukkan komponen utama yang ada pada *triple bottom line*. Komponen ekonomi menunjukkan bahwa setiap perusahaan fokus terhadap keuntungan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Komponen sosial menunjukkan agar perusahaan berkomitmen dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Sedangkan komponen lingkungan berarti seluruh kegiatan perusahaan berkaitan erat dengan lingkungan hidup dan perlu diperhatikannya keseimbangan lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Konsep *triple bottom line* tahun 2005 yang muncul dalam *world summit* menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 konsep yaitu, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian terhadap lingkungan yang saling berkaitan dan memperkuat. Oleh karena itu, apabila perusahaan telah mengakomodasikan *triple bottom line* maka perusahaan tersebut telah berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan atau *sustainability report* (Maulida, 2013).



2. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Agen meliputi seluruh pihak manajemen perusahaan seperti dewan komisaris, sedangkan prinsipal adalah pemilik perusahaan yang akan melibatkan agen dalam melakukan pekerjaan atas namanya. Teori keagenan merupakan teori yang fokus pada penyelesaian dua masalah antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan (Hapsari, 2011.). Masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, sedangkan masalah kedua muncul ketika prinsipal dan terdapat penanganan yang berbeda dalam menghadapi resiko yang muncul.

“Agency relationship as a contact under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent” (Jensen & Meckling, 1976).

Pernyataan tersebut menguraikan kaitan antara pemegang saham yang bertindak sebagai principal terhadap pihak lain, yaitu manajer yang bertindak sebagai agen. Principal adalah penyalur modal dalam bentuk dana dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional badan usaha, sedangkan agen menyediakan laporan secara teratur setiap bulan kepada principal mengenai usaha / kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut digunakan principal untuk memberikan penilaian kinerja agen (Himmawati, 2014).

3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan harus terus berupaya dalam memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan batas-batas dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Menurut Ghazali & Chariri



(2014) legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditegaskan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Menurut Martínez-Ferrero et al. (2015), teori legitimasi merupakan kontak sosial bagi perusahaan yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan kepentingan bisnis sehingga tujuan ekonomi dapat tercapai. Keberadaan dan aktivitas perusahaan akan mendapat pengakuan dari masyarakat atau lingkungan jika perusahaan tersebut beroperasi atau terlegitimasi, apabila perusahaan tersebut melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Norma perusahaan selalu berubah seiring mengikuti perkembangan zaman. Usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengikuti perubahan dalam mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Teori legitimasi menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan social, maka perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya akan mendapatkan status di masyarakat atau lingkungan sekitar perusahaan beroperasi (Puspitandari & Septiani, 2017).

4. Pengertian Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

4.1 Definisi Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

4.1.1 Definisi Keberlanjutan

Menurut *Association of Chartered Certified Accountants* keberlanjutan mencakup seluruh operasi perusahaan dimana seluruh unit perusahaan harus berkepemilikan agar keberlanjutan terlihat. Keberlanjutan adalah nilai yang setara dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan yang saling berkaitan dan dapat diartikan sebagai etika yang kuat mengenai hal yang harus dilakukan sehingga dapat disebut sebagai perintah moral (Holden, Linnerud, & Banister, 2016). Menurut Szekely (2017), keberlanjutan yaitu



bagaimana cara membangun masyarakat secara seimbang melalui kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Konsep keberlanjutan memiliki prinsip yang terkait dengan hak asasi manusia, standar bagi pekerja mengenai lingkungan seperti prinsip kehati-hatian, tanggung jawab yang lebih besar pada lingkungan, dan dapat mengembangkan suatu teknologi yang ramah lingkungan (Suryono & Prastiwi, 2011). Keberlanjutan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

4.1.2 Definisi Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah laporan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat kegiatan yang berkelanjutan (Wikipedia). Menurut Eva & Dewi (2015), *sustainability reporting* merupakan laporan yang berkonsep pada *sustainable development*. *Sustainability reporting Guidelines* menyatakan laporan keberlanjutan disusun untuk mengukur, mengungkapkan dan memperlihatkan usaha menjadi perusahaan yang bertanggung jawab bagi seluruh *stakeholders* perusahaan untuk mencapai *sustainability development*. Laporan keberlanjutan berisikan laporan yang menyampaikan tentang dampak organisasi, baik itu positif maupun negative terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah.

Menurut *Global Reporting Initiative (GRI)*, *sustainability report* adalah praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan akan menjadi media dalam mendeskripsikan pelaporan ekonomi, sosial dan lingkungan yang diungkapkan melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



website perusahaan, dengan begitu *stakeholder* dapat mengakses dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan (Prabawati, 2014).

Laporan keberlanjutan dianggap sebagai sinonim atau diartikan sebagai laporan non keuangan, laporan *triple bottom line*, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang merupakan elemen intrinsik dari pelaporan terintegrasi dan perkembangan yang lebih baru dalam menggabungkan analisis kerja keuangan dan non keuangan. Sebutan itu pertama kali diperkenalkan oleh Elkington (1997) melalui bukunya “*Cannibals with forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Melalui buku ini, Elkington menggambarkan perusahaan berkelanjutan wajib menerapkan 3P. Bukan hanya menghasilkan laba (*profit*), perusahaan juga wajib memperhatikan ketenteraman masyarakat (*people*), serta memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). Laporan keberlanjutan dimanfaatkan oleh setiap perusahaan untuk dapat memberikan akuntabilitas tentang kinerja sosial dan lingkungan perusahaan.

4.1.3 Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Isi dasar dalam laporan keberlanjutan harus mengacu pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 2016 seperti :

- 1) Pengungkapan Standar Umum, berlaku untuk semua organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan.
- 2) Pengungkapan Standar Khusus, mengenai cara menyiapkan informasi yang akan diungkapkan dan menginterpretasikan konsep-konsep dalam pedoman yang disajikan dalam kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia dan di beberapa Negara lain masih bersifat sukarela (*voluntary*), yang berarti tidak adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan *financial reporting* (Utama dalam Apriani, 2016).



Pelaporan *sustainability report* belum memiliki peraturan baku sehingga cara pengungkapannya mengikuti kebijakan manajemen perusahaan. Hal ini yang menyebabkan keragaman yang besar dalam pengungkapan informasi sosial pada laporan tahunan masing-masing (Kamaludin (2017)). Namun beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai mengungkapkan laporan keberlanjutan sebagai bentuk laporan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan yang disajikan secara terpisah dari *annual report*.

Sustainability report akan tercapai apabila ketiga komponen terlaksanakan (Widiyanto, 2011). Menurut Tarr & O'Connor (2014), pengungkapan standar dalam *sustainability report* terdiri dari :

- 1) Ekonomi
- 2) Lingkungan
- 3) Sosial Sub Kategori Praktek Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak
- 4) Sosial Sub Kategori hak Asasi Manusia
- 5) Sosial Sub Kategori Masyarakat
- 6) Sosial Sub Kategori tanggung Jawab Produk

5. Prinsip Pengungkapan *Sustainability Report*

Prinsip pelaporan dalam mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan sangat berperan penting dan perlu diterapkan oleh semua organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutan. Menurut GSSB (2016), prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan dan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan yang dirincikan sebagai berikut :

- 1) Prinsip-prinsip untuk Menentukan Konten Laporan



Menjelaskan proses yang harus diterapkan dalam mengidentifikasi konten laporan

C yang harus dibahas dengan mempertimbangkan aktivitas, harapan, dampak, dan kepentingan yang substantif dari para pemangku kepentingan.

a) Pelibatan Pemangku Kepentingan

Organisasi wajib mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menjelaskan bagaimana organisasi menanggapi harapan dan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.

b) Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

c) Materialitas

Laporan harus mencakup topik-topik yang relevan seperti :

- i. Mencerminkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan dari organisasi.
- ii. Secara substansial mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan.

d) Kelengkapan

Laporan harus berisikan aspek material dan *boundary* untuk mencerminkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan, dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan.

2) Prinsip-prinsip untuk Menentukan Kualitas Laporan

Kualitas informasi merupakan hal penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan agar dapat membuat asesmen kinerja yang logis dan mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tindakan yang tepat. Prinsip-prinsip dibawah ini merupakan hal mendasar dalam

③ mencapai transparansi :

- a) Keseimbangan
Laporan wajib mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi dan menghindari format pemilihan, penghilangan, penyajian yang terlalu berlebihan dan tidak tepat dalam mempengaruhi pembaca laporan dalam pengambilan keputusan.
- b) Komparabilitas
Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten dan disajikan dengan cara menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan mendukung analisis *relative* terhadap organisasi lain.
- c) Akurasi
Informasi yang dilaporkan harus akurat dan terperinci agar para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi.
- d) Ketepatan Waktu
Organisasi harus teratur mengikuti jadwal dalam membuat laporan sehingga informasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan dengan tepat waktu.
- e) Kejelasan
Organisasi harus menyediakan informasi yang dapat dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.
- f) Keandalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi dalam menyiapkan laporan, agar laporan dapat diuji dan dapat ditentukan kualitas dan materialitas informasinya.

6. Standar *Global Reporting Initiative (GRI) 2016*

Standar GRI merupakan sebuah *framework* sebagai dasar dalam penyusunan laporan keberlanjutan yang dirancang untuk terciptanya pemahaman yang sama bagi organisasi dan pemangku kepentingan, sehingga dampak dari ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dikomunikasikan, dipahami dan diperbandingkan secara global. Laporan yang dibuat berdasarkan standar GRI wajib melampirkan indeks GRI dan menyajikannya secara lengkap.

Dalam *GRI index* terdapat 6 indikator berupa landasan (GRI 101), pengungkapan umum (GRI 102), pendekatan manajemen (GRI 103), ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400).

Menurut Ramadani, (2019), terdapat prinsip-prinsip yang perlu diterapkan agar laporan berkelanjutan sesuai dengan standar GRI yang ada, yaitu :

- 1) Inklusivitas pemangku kepentingan, laporan berkelanjutan perlu mengidentifikasi *stakeholder*-nya dan menjelaskan batasan keterlibatan para pemangku kepentingan.
- 2) Konteks keberlanjutan, laporan perlu menjelaskan kinerja perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- 3) Materialitas, laporan berkelanjutan perlu menjelaskan cakupan topik yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh pada penilaian *stakeholder*.
- 4) Kelengkapan, laporan berisikan topik material dan batasannya menjelaskan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh pada penilaian *stakeholder*.



7. Indikator Pengungkapan Dalam Standar GRI

Tabel 2.1

Indikator Pengungkapan Dalam Standar *Global Reporting Initiative* (GRI)

Indikator Kinerja Ekonomi	
Kinerja Ekonomi	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan dan pembayaran ke penyedia modal serta pemerintah
EC 2	Implikasi keuangan dan berbagai resiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim
EC 3	Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan <i>benefit</i> yang sudah ditetapkan
EC 4	Bantuan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah
Keberadaan Pasar	
EC 5	Parameter standar upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu
EC 6	Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi
EC 7	Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan proporsi manajemen senior yang diambil dari komunikasi setempat di beberapa lokasi operasi
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
EC 8	Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang

© Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan ataupun yang sifatnya natura
1. EC 9	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luas dampaknya
Indikator Kinerja Lingkungan	
Material	
EN 1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran
EN 2	Presentase material bahan daur ulang yang digunakan
Energi	
EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung
EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung
EN 5	Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konserfasi yang lebih baik
EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber gaya terbaru serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif tersebut
EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan
Air	
EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya
EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber mata air
EN 10	Presentasi dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali

Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang menguht sekhian atiku se tiku tulisni tanpa pncantumkan dan menyutukan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keanekaragaman Hayati

<p>1. EN 11</p>	<p>① Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola atau yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi</p>
<p>2. EN 12</p>	<p>Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati ada diwilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi</p>
<p>3. EN 13</p>	<p>Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali</p>
<p>4. EN 14</p>	<p>Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati</p>
<p>5. EN 15</p>	<p>Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahan</p>
<p>Emisi, Effluent dan Limbah</p>	
<p>6. EN 16</p>	<p>Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat</p>
<p>7. EN 17</p>	<p>Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat</p>
<p>8. EN 18</p>	<p>Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan</p>
<p>9. EN 19</p>	<p>Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarakan berat</p>
<p>10. EN 20</p>	<p>NO, SO, dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat</p>
<p>11. EN 21</p>	<p>Total air yang dibuang berdasar kualitas dan tujuan</p>
<p>12. EN 22</p>	<p>Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode</p>

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



	pembuangan
EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah
EN 24	Berat dari limbah yang ditranspotasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan <i>Basel Convention Amex</i> , I, II, III, dan VIII, dan presentasi limbah yang dikapalkan secara internasional
EN 25	Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada di sekitarnya secara signifikan terkenda dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan
Produk dan Jasa	
EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif tersebut
EN 27	Presentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori
Kesesuaian	
EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup
Transportasi	
EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya dan para pegawainya
Keselarasan	
EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indikator Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak

Pekerjaan

- LA 1** Komposisi tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi
- LA 2** Jumlah total rata-rata *turnover* tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan area
- LA 3** Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap

Hubungan Tenaga Kerja Manajemen

- LA 4** Presentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif
- LA 5** Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- LA 6** Presentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja
- LA 7** Tingkat dan jumlah kecelakaan, penyakit karena jabatan, jumlah hari hilang dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area
- LA 8** Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan dan pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius
- LA 9** Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian resmi serikat pekerja

Pendidikan dan Pelatihan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



<p>LA 10</p>	<p>Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai berdasarkan kategori pegawai</p>
<p>LA 11</p>	<p>Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung para pegawai dan membantu mereka untuk terus berkarya</p>
<p>LA 12</p>	<p>Presentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas performa dan perkembangan mereka secara berkala</p>
<p>Keanekaragaman dan Kesempatan Setara</p>	
<p>LA 13</p>	<p>Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekaragaman lainnya</p>
<p>LA 14</p>	<p>Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori pegawai</p>
<p>Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia</p>	
<p>Praktik Investasi dan Pengadaan</p>	
<p>HR 1</p>	<p>Presentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia</p>
<p>HR 2</p>	<p>Presentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan</p>
<p>HR 3</p>	<p>Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk presentase pegawai yang dipilih</p>
<p>Non Diskriminasi</p>	
<p>HR 4</p>	<p>Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil</p>

Hak cipta milik IBIKKG. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilang mengu... sebagai... atau seluruh karya tulis ini lampir... membantu... menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok

1. **HR 5** Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi beresiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut

Tenaga Kerja Anak

HR 6 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk penghapusan pekerja anak

Pegawai Tetap dan Kontral

HR 7 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk penghapusan pegawai kontrak

Praktik Keselamatan

HR 8 Presentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja

Hal Penduduk Asli

HR 9 Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil

Indikator Kinerja Kemasyarakatan / Sosial

Kemasyarakatan

SO 1 Sifat dasar, cakupan dan keefektivan atas program dan kegiatan apapun yang menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi selama beroperasi dan pasca operasi

Korupsi

SO 2 Presentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisis memiliki resiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi

1. Ha Cipta mi IBI KKG (Insti it Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) ndungi Ha Cipta D ngdang- U ndang 1. arang mel utip se iban ata seluruh arya tu ini hamp menca rkan dan menyeb utkan s ng ber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SO 3	Presentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyusunan dan korupsi
SO 4	Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyusunan dan korupsi
Kebijakan Publik	
SO 5	Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur melobi publik
SO 6	Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi terkait oleh negara dimana perusahaan beroperasi
Perilaku anti Persaingan	
SO 7	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, anti <i>trust</i> , praktik monopoli dan sanksinya
Kepatuhan	
SO 8	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan
Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk	
Keselamatan dan Kesehatan Konsumen	
PR 1	Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut
PR 2	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Instititit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa	
PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan presentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut
PR 4	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya
PR 5	Praktik-praktik yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survei evaluasi kepuasan konsumen
Komunikasi Pemasaran	
PR 6	Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya
PR 7	Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya
Privasi Konsumen	
PR 8	Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang
Kesesuaian	
PR 9	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: *Global Reporting Initiative*

Berdasarkan tabel 2.1 terdapat kategori berjumlah 79 indikator yang terdiri dari ekonomi 9 kategori, lingkungan 30 kategori, tenaga kerja 14 kategori, hak asasi manusia 9

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



kategori, sosial 8 kategori, dan produk 9 kategori. Indikator-indikator diatas mengandung item-item yang diungkapkan dan semakin banyaknya item-item yang diungkapkan maka dapat

disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut semakin luas.

1. Larangan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

8. Pengungkapan Sustainability Report dengan Pedoman Global Reporting Initiative (GRI)

Secara konseptual, pengungkapan adalah bagian penting dari pelaporan keuangan.

Secara teknis, pengungkapan adalah langkah akhir dalam laporan, yaitu dengan menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Menurut (Handayani, 2014), manajemen dalam media massa serta informasi di luar ruang lingkup laporan keuangan tidak termasuk dalam pengungkapan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyampaian informasi lebih dalam bentuk laporan keuangan formal.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SPAK) No. 1 (revisi 1998) paragraf sembilan menjelaskan, “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, perusahaan dapat mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam Laporan Nilai Tambah (*Value Added Statement*). Hal ini diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 (1), yaitu “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.



Pengungkapan standar dalam *sustainability report* menurut GRI-G3 Guidelines terdiri

dari:



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1) Ekonomi menjelaskan mengenai dampak yang dihasilkan perusahaan terhadap kondisi ekonomi *stakeholder* dan sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional dan global
- 2) Lingkungan menjelaskan mengenai dampak terhadap makhluk di bumi dan lingkungan sekitar termasuk ekosistem, tanah, udara dan air
- 3) Hak Asasi Manusia menjelaskan adanya keterbukaan dalam pemilihan investor dan pemasok/kontraktor
- 4) Masyarakat menjelaskan mengenai pemusatan perhatian pada dampak perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan dan mengungkapkan resiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan lembaga sosial lainnya
- 5) Tanggung jawab produk berisi pelaporan produk dan layanan yang mempengaruhi pelanggan secara langsung, yaitu kesehatan dan keamanan, informasi dan pelabelan, pemasaran dan privasi
- 6) Sosial berisi kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menginspirasi penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Intan Apriani
---------------	---------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul Penelitian	Analisis Pengungkapan <i>Sustainability report</i> Pada Perusahaan BUMN Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2014
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	Pengungkapan <i>sustainability report</i>
Kesimpulan	Praktik dan kebijakan bisnis semakin bertentangan dengan transformasi yang terjadi menuju ke lingkungan hidup yang berkesinambungan dan <i>sourcing</i> yang bertanggung jawab

Nama Peneliti	Noviyanti Zaitun Kaaro Lintje Kalangi
Judul Penelitian	Perilaku Sosial PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar
Tahun Penelitian	2013
Variabel Penelitian	Bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan
Kesimpulan	Besarnya biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan tidak dipengaruhi oleh tingkat penjualan bersih perusahaan

Nama Peneliti	Aziz
Judul Penelitian	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability report</i>

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2014
Variabel Penelitian	Ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan
Kesimpulan	Ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan dan kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif

Nama Peneliti	Fitri Yanti dan Ni Ketut Rasmini
Judul Penelitian	Analisis Pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> dan Faktor Yang Mempengaruhi : Studi Di Perusahaan Indonesia Dan Singapura
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i>
Kesimpulan	<i>Leverage</i> dan likuiditas berpengaruh negatif pada <i>triple bottom line</i> , sedangkan profitabilitas, kepemilikan asing, dan karakteristik Negara berpengaruh positif pada <i>triple bottom line</i>

Nama Peneliti	Adellina Kurnia Ramadani
---------------	--------------------------

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan atau menyetujui penyediaan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul Penelitian	Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Pt Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Tahun 2016 Dan 2017 Berdasarkan Standar <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI)
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Pengungkapan Laporan Keberlanjutan berdasarkan Standar <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI)
Kesimpulan	Tidak semua pengungkapan di dalam Standar GRI dilaporkan
Nama Peneliti	Herawati dan Yossi Diantimala
Judul Penelitian	Tingkat Pengungkapan Keberlanjutan (<i>Sustainability Disclosure</i>) : Analisis Perbandingan Perusahaan Keuangan dan Perusahaan Non Keuangan Di Indonesia
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	Tingkat Pengungkapan Keberlanjutan
Kesimpulan	Perusahaan non keuangan mengungkapkan pengungkapan keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan keuangan

C. Kerangka Pemikiran

Sustainability report menyajikan pengungkapan mengenai dampak suatu organisasi baik yang positif maupun negatif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berkembangnya

Hak cipta milik IBI KKI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



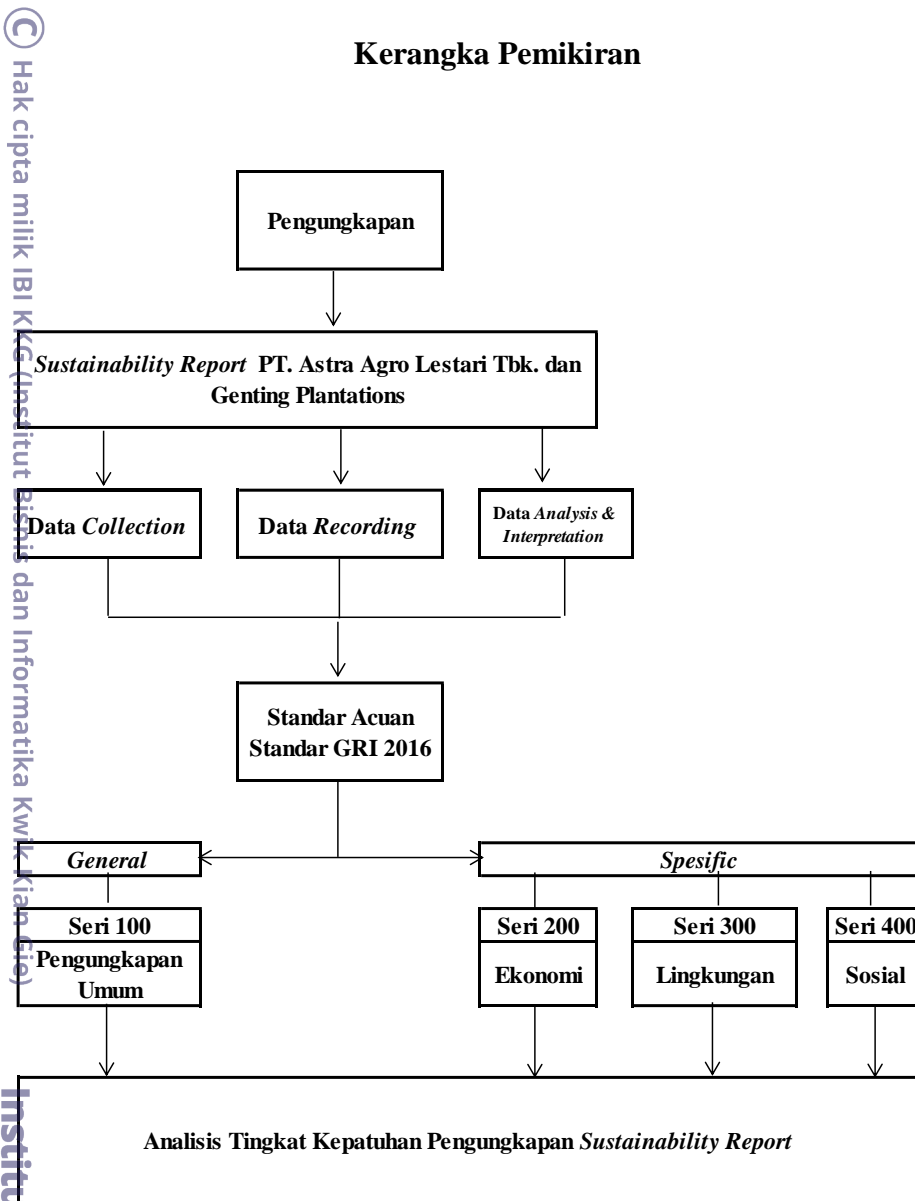
dunia bisnis saat ini bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan, melainkan setiap perusahaan juga dituntut untuk dapat menyeimbangkan konsep TBL (*Triple Bottom Line*)

atau yang dikenal dengan sebutan *Profit-People-Planet*. Untuk mengaplikasikan konsep TBL maka perusahaan diminta untuk mengungkapkannya dalam bentuk laporan keberlanjutan.

Menurut GRI (*Global Reporting Initiative*) 2016 *sustainability report* yaitu praktik pengukuran dan pengungkapan serta upaya akuntabilitas kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Tujuan pembangunan keberlanjutan yaitu bagaimana sebuah perusahaan memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi kemampuan bagi generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. *Sustainability report* harus mendeskripsikan sebuah laporan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan pada laporan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan yang disusun berdasarkan standar GRI (*Global Reporting Initiative*) 2016. Berikut kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.